

ANALISIS JURNAL

“DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019”

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Jumlah SKS : 2

Semester/Kelas : 2/F

Pengampu Mata Kuliah : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.

2. Drs. Rapani, M.Pd.



Disusun Oleh :

Desmita Maharani (2413053185)

**PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ANALISIS JURNAL

“DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019”

Jurnal yang ditulis oleh R. Siti Zuhro dan diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Politik LIPI pada Juni 2019 ini membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada Pemilu Presiden 2019. Penulis menyatakan bahwa meskipun Indonesia telah melaksanakan pemilu secara teratur, sistem demokrasi di negara ini masih belum sepenuhnya matang, karena lebih menekankan pada aspek prosedural ketimbang nilai-nilai substantif demokrasi itu sendiri.

Pemilu 2019 memperlihatkan adanya polarisasi yang tajam di kalangan masyarakat, terutama antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Isu politisasi agama dan identitas juga semakin memperburuk situasi, yang berpotensi merusak nilai toleransi dan keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Penulis juga mengkritik peran partai politik yang semakin lemah, di mana banyak partai lebih fokus pada mendukung tokoh atau artis terkenal, ketimbang membangun sistem kaderisasi politik yang kuat untuk mewakili aspirasi rakyat.

Jurnal ini juga menyoroti masalah ketidaknetralan birokrasi, dengan beberapa aparat sipil negara yang terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip netralitas birokrasi yang harus dijaga dalam sistem demokrasi. Penulis juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap partai politik, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum. Tanpa adanya kepercayaan publik, legitimasi pemilu akan terganggu, yang dapat mengancam kelangsungan demokrasi itu sendiri.

Secara keseluruhan, meskipun pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sesuai prosedur, demokrasi di negara ini masih menghadapi tantangan besar. Untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak baik dari elite politik, birokrasi, maupun masyarakat sipil agar demokrasi yang berjalan tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan politik.